

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PONTIANAK
TAHUN 2010 - 2014**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PONTIANAK
2010**

KATA PENGANTAR

Rencana strategik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak tahun 2010-2014 ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BPTP Pontianak sesuai dengan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, serta Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 72/Kpts/OT.140/4/2008 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

Rencana strategik ini memuat permasalahan perlindungan yang dihadapi, visi, misi, tujuan dan sasaran, program kerja serta uraian kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra BPTP Pontianak ini mengacu pada Rencana Strategik Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014. Kegiatan disusun berdasar permasalahan riil yang dihadapi, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan periode 2005-2009.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPTP Pontianak ini adalah sebagai landasan perencanaan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan proteksi tanaman perkebunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pontianak, Januari 2010

Kepala Balai,
Irwanto
Ir. Sarawadi
NIP. 19620709/198903 1 001



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	PENCERMATAN LINGKUNGAN STRATEGIS	6
III.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	11
IV.	STARTEGI	14
V.	INDIKATOR KINERJA	18
VI.	PENUTUP	
	LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Luas areal perkebunan di Indonesia meningkat cukup signifikan selama periode tahun 2005-2009, yaitu mencapai ± 2.600 ha, dengan laju pertumbuhan 3,67% pertahun, dengan rincian $\pm 74\%$ perkebunan rakyat, $\pm 6\%$ perkebunan besar negara dan $\pm 20\%$ perkebunan besar swasta. Pada beberapa komoditi unggulan, perkembangan luas areal sebanding dengan peningkatan produksi yang juga cenderung meningkat mencapai 10,34% pertahun. Sektor perkebunan sangat berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sumber devisa, penyediaan pangan, penyediaan lapangan kerja dan bahan baku industri.

Areal perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari luas areal pada tahun 2004 ± 985.876 Ha menjadi 1.208.759 pada akhir tahun 2008. Sebanyak 547.691 KK menggantungkan hidupnya dari usaha perkebunan, terutama karet, kelapa, kakao.

Secara umum, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan antara lain adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih rendah, masalah sumber daya dan pemanfaatan lahan, ketergantungan pekebun maupun petugas yang masih berorientasi kepada anggaran Pemerintah, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, efisiensi agribisnis perkebunan, liberalisasi pasar global dan perubahan iklim global.

Rendahnya produktivitas yaitu sekitar 40 – 68 % dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi ($> 85\%$) terjadi karena sebagian besar pola budidaya perkebunan rakyat masih tradisional, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tidak dikendalikan secara optimal. Faktor OPT juga menjadi faktor penghambat ketidakberhasilan produk pertanian Indonesia bersaing di pasar domestik dan pasar luar negeri. Di samping sangat menurunkan kuantitas produksi serangan hama juga menurunkan kualitas dan harga produk, serta daya saing produk di pasar. Secara finansial kerugian hasil karena kerusakan oleh hama sangat besar, mencapai milyaran rupiah setiap tahun.

Dampak tidak langsung dari gangguan usaha selain OPT adalah penjarahan/gangguan keamanan yang menyebabkan aktifitas pengelolaan kebun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dampak anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir berpengaruh terhadap kehilangan produksi

Berbagai klaim terhadap produk ekspor perkebunan Indonesia di pasar Internasional telah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sebagai contoh dikenakan penahanan otomatis (*automotic detention*) oleh *United States Food and Drugs Administration* (USFDA) terhadap ekspor biji kakao Indonesia. Klaim dan penolakan produk ekspor perkebunan Indonesia akibat tidak memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) terutama karena adanya serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida.

Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) telah menyepakakati SPS sebagai salah satu bentuk hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Di samping persyaratan SPS, produk pertanian ekspor juga harus memenuhi persyaratan teknis WHO mengenai kandungan bahan berbahaya di pangan, terutama residu pestisida. Kandungan residu bahan-bahan berbahaya, seperti pestisida dan alfatoksin harus tidak melebihi batas maksimum residu yang ditetapkan oleh WHO atau negara tujuan ekspor.

Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk perkebunan yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya aspek kelestarian lingkungan dan K3 dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penilaian terhadap aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan dinilai pada keseluruhan proses produksi sampai pemasaran yang dikenal dengan pendekatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan termasuk didalamnya **Sistem Manajemen ISO 9000** tentang Manajemen Mutu, **ISO 14000** tentang Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang dikenal dengan **Sistem HACCP** (*Hazard Analysis Critical Control Point*). Produk perkebunan yang dalam

proses produksinya tidak ramah lingkungan, tidak mengindahkan K3 serta Hak-hak Azasi Manusia dapat ditolak atau tidak diterima oleh pasar/ konsumen.

Perubahan lingkungan global dan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU no. 22/ 1999 dan PP 25/ 2000 tentang Otonomi Daerah juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor, dan regulator dalam konteks pengendalian agar semua **stake holder** yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan perlindungan tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan tanaman yang sinergi dan optimal.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun international di atas termasuk globalisasi dan otonomi daerah serta perubahan paradigma yang ada, maka disusun **”Rencana Strategik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak tahun 2010 – 2014”**.

Rencana Strategis BPTP Pontianak ini menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan perlindungan perkebunan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BPTP Pontianak sebagai instalasi teknis perlindungan tanaman perkebunan. Dokumen ini disusun berdasar analisis strategis potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BPTP Pontianak. Dokumen ini juga memuat indikator kineja sebagai sarana monitoring dan evaluasi selama periode 2010-2014.

1.2. Kebijakan Pembangunan Perkebunan

Selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan visi pembangunan perkebunan 2010-2014: **”Terwujudnya agribisnis perkebunan yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat perkebunan secara berkeadilan”**.

Misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan *Good Agriculture Practices* dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif;
2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan yang memiliki kemampuan teknis dan berusaha serta mempunyai integritas moral yang bersih dan peduli;
3. Meningkatkan akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, saran prasarana bagi masyarakat perkebunan;
4. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan di sentra-sentra produksi;

1.3. Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Sejalan dengan arahan kabinet baru dan Renstra Direktorat Jenderal Perlindungan Perkebunan, maka visi perlindungan perkebunan adalah : **”Menjadi Direktorat yang mendukung kemandirian pelaku usaha perkebunan dalam melaksanakan perlindungan tanaman dan penanganan gangguan usaha perkebunan yang berkelanjutan”**. Sedangkan misi perlindungan perkebunan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan SDM, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana prasarana, dan memantapkan sistem perlindungan perkebunan.
2. Meningkatkan upaya pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan dampak gangguan usaha dan dampak anomali iklim.
3. Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan (SIMPP)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi Direktorat Perlindungan Perkebunan tersebut dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas guna mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan misi, semangat mewujudkan pemerintahan yang baik dan profesionalitas aparat yang terkait dalam melaksanakan tugas, dan didukung peningkatan kualitas aparat untuk memperoleh hasil yang optimal.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun 2010– 2014 adalah sebagai arahan dalam perencanaan kegiatan pengembangan perlindungan perkebunan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas BPTP Pontianak serta koordinasi dengan unit internal dan pihak lain di luar Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam pelaksanaannya akan diadakan penyesuaian sesuai perkembangan yang terjadi.

II. PENCERMATAN LINGKUNGAN STRATEJIK

2.1. Pencermatan Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1) Landasan Hukum

Tersedianya Landasan Hukum pelaksanaan perlindungan perkebunan dan penanganan GUP (UU, PP, Permentan)

a. Peraturan Perundangan yang terkait dengan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT):

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang “Sistem Budidaya Tanaman”;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang “Perlindungan Tanaman”;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang “Perlindungan Hutan”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/OT.140/1/2007 tentang “Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas”;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/2007 tentang “Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan”

b. Peraturan Perundangan yang terkait dengan Non Organisme Pengganggu Tumbuhan (Non OPT)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang “Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan”;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang “Sistem Budidaya Tanaman”;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 tentang “Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit”
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang “Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan”

2) Kelembagaan

- Tersedianya Jabatan struktural : satu eselon III (Kepala Balai), empat eselon IV (Seksi Pelayanan Teknik, Seksi Jaringan Laboratorium, Seksi Data dan Informasi dan Sub Bagian Tata Usaha)
- Tersedianya unit kerja teknis (Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama dan Sub Laboratorium Pengendalian Hayati, Brigade Proteksi Tanaman, Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman);
- Tersedianya Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

3) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Tersedianya (SDM) BPTP Pontianak sebanyak 111 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 = 4 orang, S1+ = 1 orang, S1 = , SLTA = , SLTP, SD = 1 orang

4) Pembiayaan

- Tersedianya alokasi biaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPTP Pontianak melalui APBN

5) Sarana Kerja

- Tersedianya sarana kerja (kendaraan bermotor, alat pengolah data, alat komunikasi, dll) yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPTP Pontianak
- Tersedianya prasarana kerja (bangunan kantor, asrama, bangunan laboratorium dan ruma kaca)

6) Teknologi

- Tersedianya perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
- Tersedianya perangkat Sistem Akutansi Instansi (SAI)
- Tersedianya perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)
- Tersedianya hardware dan soft ware untuk pengumpulan dan pengolahan data

7) Pedoman dan Standar

- Tersedianya pedoman umum, pedoman teknis, baku operasional, Sistem Informasi Manajemen Perkebunan, Prosedur Operasional Standar

B. Kelemahan

- 1) Regenerasi SDM bidang perlindungan berjalan lambat;
- 2) Jumlah petugas Pengamat Hama (Fungsional POPT) yang tidak sebanding dengan luas areal yang harus diamati;
- 3) Kondisi geografis yang sulit di jangkau
- 4) Koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota belum optimal;

- 5) Kegiatan perlindungan perkebunan belum menjadi prioritas di sebagian besar Kabupaten/Kota;
- 6) Penerapan pedoman umum, pedoman teknis, baku operasional, Sistem Informasi Manajemen Perkebunan, Prosedur Operasional Standar belum optimal;
- 7) Laboratorium pendukung (LL,LUPH, Sub. Lab. dan BPT) belum terakreditasi;
- 8) Sistem informasi belum berjalan dengan baik akurasi data dan kontinuitas pelaporan, analisis data dan penyajian data spasial
- 9) Dana yang tersedia belum cukup untuk mendukung operasional kegiatan
- 10) Kualitas sarana dan prasarana pendukung belum memenuhi standar

2.2. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

A. Peluang

- 1) Teknologi terapan perlindungan perkebunan terus berkembang;
- 2) Antusiasme masyarakat dalam perlindungan dan penanganan GUP masih cukup tinggi;
- 3) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan masih bisa ditingkatkan;
- 4) Permintaan informasi perlindungan perkebunan dan penanganan GUP cukup besar;
- 5) Peran serta Dinas yang membidangi perkebunan masih dapat di tingkatkan

B. Tantangan/Ancaman

- 1) Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan status OPT;
- 2) Kondisi agroekologis yang berpotensi menimbulkan GUP (kekeringan, banjir dan kebakaran)
- 3) Pelayanan informasi dan pelaporan yang cepat dan akurat

- 4) Lalu lintas perdagangan bebas komoditi antar wilayah sebagai salah satu media penyebaran OPT penting;
- 5) Meningkatnya kasus-kasus sengketa lahan, penjarahan lahan/kebun;
- 6) Meningkatnya penggunaan bibit-bibit palsu tanaman perkebunan;
- 7) Meningkatnya penggunaan pestisida-pestisida tidak terdaftar.

2.3. Kesimpulan Analisis

- 1) Tersedianya unit kerja teknis (Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama dan Sub Laboratorium Pengendalian Hayati, Brigade Proteksi Tanaman, Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman);
- 2) Kualifikasi SDM bidang perlindungan yang cukup professional;
- 3) Tersedianya pedoman umum, pedoman teknis, baku operasional, Sistem Informasi Manajemen Perkebunan, Prosedur Operasional Standar;
- 4) Tersedianya teknologi perlindungan perkebunan
- 5) Regenerasi SDM bidang perlindungan berjalan lambat;
- 6) Jumlah petugas Pengamat Hama (Fungsional POPT) yang tidak sebanding dengan luas areal yang harus diamati;
- 7) Koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota belum optimal;
- 8) Kegiatan perlindungan perkebunan belum menjadi prioritas di sebagian besar Kabupaten/Kota;
- 9) Penerapan pedoman umum, pedoman teknis, baku operasional, Sistem Informasi Manajemen Perkebunan, Prosedur Operasional Standar belum optimal;
- 10) Laboratorium pendukung (LL,LUPH, Sub. Lab. dan BPT) belum terakreditasi;

- 11) Keterbatasan anggaran
- 12) Teknologi terapan perlindungan perkebunan terus berkembang;
- 13) *Antusias* masyarakat dalam perlindungan dan penanganan GUP masih cukup tinggi;
- 14) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan masih bisa ditingkatkan;
- 15) Permintaan informasi perlindungan perkebunan dan penanganan GUP cukup besar;
- 16) Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan status OPT;
- 17) Lalu lintas perdagangan bebas komoditi antar wilayah sebagai salah satu media penyebaran OPT penting;
- 18) Pelayanan informasi dan pelaporan yang cepat dan akurat;
- 19) Meningkatnya kasus-kasus sengketa lahan, penjarahan lahan/kebun;
- 20) Meningkatnya penggunaan bibit-bibit palsu tanaman perkebunan;
- 21) Meningkatnya penggunaan pestisida-pestisida tidak terdaftar.

2.4. Faktor Kunci Keberhasilan

- 1) Meningkatkan pengembangan teknologi proteksi tanaman;
- 2) Mengoptimalkan perangkat laboratorium dalam rangka melaksanakan fungsi analisis teknis dan pengembangan proteksi perkebunan
- 3) Meningkatkan fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan GUP;
- 4) Meningkatkan penyebarluasan informasi perlindungan perkebunan;

- 5) Mengoptimalkan SDM perlindungan yang ada untuk bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perlindungan;
- 6) Meningkatkan kualitas SDM bidang perlindungan;
- 7) Menyamakan persepsi sama dan komitmen diantara instansi terkait di propinsi dan daerah (kabupaten/kota) terhadap arti penting perlindungan dan konsepsi penerapan PHT pada pengendalian OPT, penanganan gangguan usaha dan bencana alam;
- 8) Dukungan penyediaan dana yang memadai;

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, tugas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah ” **Melaksanakan Analisis Teknis dan Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan** ”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;
2. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
3. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
5. Pelaksanaan pengembangan metode peramalah, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
6. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
7. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
8. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
9. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;

10. Pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
11. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
12. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;
13. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.2. Visi

Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan **visi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan** yaitu “ *Menjadi Instansi yang Profesional dalam Memberikan Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan*”

3.3. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka misi dari Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan pelayanan analisis perlindungan perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan;
3. Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan (SIMPP);
4. Penegakan hukum di bidang perlindungan perkebunan

3.4. Tujuan

- 1) Meningkatkan pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- 2) Meningkatkan pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati;
- 3) Meningkatkan fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan
- 5) Meningkatkan pengembangan jaringan laboratorium
- 6) Meningkatkan kemampuan SDM perlindungan perkebunan;

3.5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BPTP Pontianak dalam lima tahun kedepan (2010-2014) adalah :

- 1) Meningkatnya pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- 2) Meningkatnya pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati;
- 3) Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
- 4) Meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- 5) Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium;
- 6) Meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan.

IV. STRATEGI

Strategi BPTP Pontianak tahun 2010-2014 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran 1 : Meningkatnya pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah, kualitas dan capaian hasil uji coba teknologi terapan perlindungan tanaman yang spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani/pekebun
 - b. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara kegiatan uji coba dan deseminasi
 - c. Meningkatkan ketersediaan data dan hasil-hasil pengujian yang dapat diakses oleh pengguna
2. Strategi untuk mencapai sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi eksplorasi musuh alami dan pestisida nabati
 - b. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi perbanyakan, formulasi dan aplikasi agens hayati dan pestisida nabati
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan BBP2TP, Ballit, Puslit dan perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan teknologi pengendalian hayati
3. Strategi untuk mencapai sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan (GUP), yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode pengamatan dan peramalan OPT
 - b. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode monitoring dan penanganan GUP

- c. Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data OPT dan GUP yang dapat di akses oleh pengguna.
4. Strategi untuk mencapai sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi perlindungan perkebunan
 - b. Meningkatkan pengembangan dan penyebaran media informasi perlindungan perkebunan
 - c. Meningkatkan ketersediaan jumlah dan kualitas bahan/media informasi yang dapat diakses oleh pengguna
 5. Strategi untuk mencapai sasaran 5 : Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium
 - b. Meningkatkan penerapan sistem mutu dan manajemen laboratorium
 - c. Menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk akreditasi laboratorium
 - d. Meningkatkan kerjasama jaringan laboratorium dengan BBP2TP
 6. Strategi untuk mencapai sasaran 6 : Meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan jenjang pendidikan formal (S1, S2, dan S3) bagi petugas BPTP
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan/seminar/ simposium/workshop/studibanding dan magang
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pusat, regional dan daerah melalui pertemuan teknis, pertemuan koordinasi atau pertemuan konsultasi

Sehubungan dengan penetapan strategi tersebut di atas, maka disusun rencana srategik BPTP Pontianak Tahun 2010 – 2014 seperti termuat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

NO.	SASARAN UTAMA	URAIAN IKU	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan kualitas uji coba teknologi perlindungan tanaman spesifik lokasi b. Jumlah dan kualitas koleksi spesimen OPT semua komoditas perkebunan c. Jumlah dan kualitas penyelenggaraan deseminasi dan publikasi hasil-hasil pengujian d. Data dan hasil-hasil pengujian dapat diakses oleh pengguna 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, Data dan Informasi, LL, LUPH, BPT
2.	Meningkatnya pengembangan teknologi agens pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati (pesnab)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah/frekwensi eksplorasi dan jumlah perolehan APH/pesnab potensial b. Jumlah pengembangan metode perbanyakan, formulasi dan aplikasi APH/Pesnab c. Jumlah koleksi APH/pesnab yang dikembangkan/ dipelihara 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, Data dan Informasi, LL, LUPH, BPT
3.	Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan (GUP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya metode pengamatan dan peramalan OPT diperbaharui b. Tersedianya pedoman monitoring dan c. Jumlah laporan pengamatan OPT dari UPPT se d. Jumlah data OPT yang akurat, cepat, tepat dan mudah di akses 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, Data dan Informasi, LL, LUPH, BPT
4.	Meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah (Judul) leaflet/ poster/banner/ CD/ DVD/ booklet/buku yang diterbitkan b. Jumlah pameran teknologi perlindungan yang diikuti/ diselenggarakan c. Tersedianya sistem informasi geografik d. Terselenggaranya pengellolaan website e. Terselenggaranya pembuatan peta dasar 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, Data dan Informasi, LL, LUPH, BPT ,UPPT, Ballit, Puslit, dll
5.	Meningkatnya pengembangan Jaringan Labororium	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah alat dan bahan standar laboratorium yang dimiliki b. Jumlah SOP dan IK (instruksi kerja) laboratorium c. Jumlah proposal/ dokumen akreditasi yang dapat disiapkan d. Tersedianya dana untuk pelaksanaan proses 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, Labortoriun, Data dan Informasi, LL, LUPH, BAN, KAN
6.	Meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah petugas BPTP yang meningkatkan jenjang pendidikan formal (S1, S2 dan S3) b. Jumlah petugas BPTP yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional c. Jumlah petugas yang mengikuti seminar/ simposium/workshop/studi banding/magang d. Jumlah pertemuan teknis yang diselenggarakan atau yang diikuti/dihadiri 	Seksi Pelayanan Teknik, Jaringan Laboratorium, data dan Informasi, Tata Usaha

V. INDIKATOR KINERJA

Renstra Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran utama, perlu ditetapkan indikator kinerja utama BPTP Pontianak berdasarkan 6 (enam) sasaran 2010 -2014 yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Meningkatnya pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- 2) Meningkatnya pengembangan teknologi agens pengendali hayati dan pestisida nabati;
- 3) Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
- 4) Meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- 5) Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium;
- 6) Meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan.

Berdasarkan sasaran tersebut, maka disusun indikator kinerja utama BPTP Pontianak seperti termuat pada Tabel 2 dan sasaran capaian indikator kinerja BPTP Pontianak tahun 2010 – 2014 seperti termuat pada Tabel 3.

		10.2	Pengelolaan Urusan Kepegawaian	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Pegawai	Keg	0	1	0	1	0
				2	Pengelolaan Tatausaha Kepegawaian	Keg	3	4	4	4	4
				3	Pengembangan SIMPEG	Keg	1	1	1	1	1
				4	Penyusunan Analisis Jabatan	Keg	1	1	1	1	1
				5	Pembinaan Kepegawaian Regional Kalimantan	Paket	1	1	1	1	1
				6	Pembinaan Kepegawaian dan Teknis Petugas BPTP	Paket	1	1	1	1	1
		10.3	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Optimalisasi PNBP	1	Penataan Sistem Administrasi Keuangan Anggaran Kinerja	Paket	1	1	1	1	1
				2	Intensifikasi PNBP	Keg	1	1	1	1	1
		10.4	Pemantapan Sistem Akutansi dan Verifikasi Anggaran	1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Keuangan	Keg	0	1	1	1	1
				2	Penerapan Sistem Akutansi Instansi (SAI)	Keg	1	1	1	1	1
		10.5	Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	Evaluasi Kinerja Program Kegiatan	Keg	1	1	1	1	1
				2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	Keg	1	1	1	1	1
		10.6	Penata Usahaan Barang Milik Negara	1	Penerapan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)	Keg	1	1	1	1	1
				2	Penataan Barang Milik Negara (pelabelan dll)	Keg	1	1	1	1	1

VI. PENUTUP

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan dan sub-sub kegiatan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dalam kurun waktu tahun 2010-2014 adalah untuk meningkatkan kualitas hasil dan produktivitas komoditi perkebunan, melalui upaya menurunkan kehilangan hasil produksi akibat OPT menggunakan teknologi perlindungan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan lokal setempat; mengurangi terjadinya gangguan usaha non OPT yang akan berdampak terhadap kuantitas dan kualitas produk perkebunan melalui upaya sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi perlindungan perkebunan oleh jajaran perangkat perlindungan yang terdiri dari manusia-manusia terdidik, terlatih, profesional, akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program kerja, pengamanan dan keberlanjutan produksi perkebunan, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen bersama seluruh *stake-holders* baik tingkat pusat, Kabupaten/Kota dengan dukungan dana serta sarana prasarana yang memadai.